



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**UNIT KERJA** : STAF KHUSUS MENTERI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DR. ULFAH MAWARDI, M.PD
2. Jabatan : STAF KHUSUS MENTERI
3. NHK : 816731

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.120.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000
4. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 12 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 124.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA B401RA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 29.000.000****D. SURAT BERTHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 73.500.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 2.347.000.000**



III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.247.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.